



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR      TAHUN

RENCANA KERJA INSPEKTORAT  
TAHUN 2022

Sarilamak, Juli 2021

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang Telah Memberikan kekuatan dan petunjuk- Nya sehingga telah disusun Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2022

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2022 memuat tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, yang dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 sehingga bisa mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah, semoga dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Sarilamak, Juli 2021

Pit. INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**SUHERMAN, SE**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 19681225 199703 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
PERATURAN BUPATI NOMOR    TAHUN       .....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	I-1	
1.2 Landasan Hukum.....	I-4	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5	
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-18	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	II-20	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-22	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-31	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-4	
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-9	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....		IV-1
BAB V PENUTUP.....		V-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d Tahun 2020
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2021-2026
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

HAL : RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diharapkan seluruh kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen

perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2022.

Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat untuk detail penyusunannya

2. Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2022.

Pada awal bulan Desember 2020 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Renja Inspektorat oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2019, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2020.

3. Penyusunan Renja Inspektorat mencakup analisis gambaran pelayanan Inspektorat dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Inspektorat;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat; dan
- e. Penutup.

4. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup :

- 1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan usulan program ,kegiatan dan sub kegiatan;

- 2) Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Penyelarasan kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 4) Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 5) Penetapan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi;

#### 5. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Inspektorat dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum dilaksanakan di Bapelitbang.

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program ,kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

## 6. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat menjadi Rancangan Akhir Renja Inspektorat berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Inspektorat disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Renja Inspektorat

## 7. Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

### **1.2. Landasan Hukum**

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas PERDA No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah

sesuai fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.
2. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020**

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap Rancangan RKPD dan penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat dan Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Bab III. Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tujuan dan sasaran renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan uraian tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Untuk Tahun 2022

### **Bab V. Penutup**

Bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparaturnya pengawasan dalam

menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

**TUJUAN:**

1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikerahkan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan. Pada tabel berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan pencapaian renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020.

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2020 dapat diketahui seperti diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan  
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota

Lembar 1 dari 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pencapaian realisasi keuangan	95%	95%	95%	95%	100,00 %	95%			
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman dokumen dan surat (lembar)	4.575	915	915	915	100,00 %	915	2.745	60%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan dibayarkannya jasa telepon, air, listrik, dan internet (bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	36 bulan	60%
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan honorarium, Jasa Pegawai Harian Lepas, dan Lembur yang dibayarkan (bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dan jumlah bulan honor petugas kebersihan (jenis dan bulan)	13 Jenis dan 60 bulan	13 Jenis dan 12 bulan	13 Jenis dan 12 bulan	13 Jenis dan 12 bulan	100,00 %	13 Jenis dan 12 bulan	13 Jenis dan 36 bulan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah servis berkala per bulan dan perbaikan peralatan kerja yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,36 %	12 bulan	36 bulan	56,67%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan (Jenis)	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100,00 %	30 jenis	30 jenis	60%
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran penggandaan	8 jenis dan 84.010 lembar	8 jenis dan 84.010 lembar	8 jenis dan 84.010 lembar	8 jenis dan 84.010 lembar	100,00 %	8 jenis dan 84.010 lembar	24 jenis dan 252.030 lembar	60%
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis alat listrik yang diadakan (jenis)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00 %	6 jenis	6 jenis	60%
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	60 bulan	12 bulan	24 bulan	24 bulan	99,08 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perda yang diadakan	20 koran, 50 buku	4 koran, 10 buku	4 koran, 10 buku	4 koran, 10 buku	100,00 %	4 koran, 10 buku	12 koran, 30 buku	60%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan (porsi)	15.995 porsi	3.199 porsi	3.199 porsi	3.199 porsi	100,00 %	3.199 porsi	9.597 porsi	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	960 OH	192 OH	192 OH	192 OH	100,00 %	192 OH	576 OH	60%
X	xx	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50%</b>		
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	15 unit, 2 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	-	-	-	5 unit	2 unit kendaraan roda 2	30%
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00 %	10 jenis	10 jenis	60%
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	1 paket mobiler	1 paket mobiler	1 paket mobiler	1 paket mobiler	100,00 %	1 paket mobiler	1 paket mobiler	60%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan	Renovasi Ruang, 1 Backwall, 1 Front Office, 1 kanopi tempat parkir	-	1 Backwall	1 Backwall	100,00 %	1 front office, 1 kanopi tempat parkir	1 Backwall, 1 front office, 1 kanopi tempat parkir	60%
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan secara berkala (unit)	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	100,00 %	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	60%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00 %	6 jenis	6 jenis	60%
X	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dilakukan pemeliharaan	155 unit mebeleur	31 unit mebeleur	31 unit mebeleur	31 unit mebeleur	100,00 %	31 unit mebeleur	93 unit mebeleur	60%
X	xx	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kehadiran ASN</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95%</b>		
X	xx	03	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 stel	-	45 stel	45 stel	100,00 %	50 stel	135 stel	60%
X	xx	05		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase APIP yang telah terlatih</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>92%</b>		
X	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	180orang	36 orang	36 orang	36 orang	100,00 %	36 orang	108 orang	60%
1	20			<b>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admistrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian</b>									
1	20	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>40%</b>							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	20 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	400	80	80	80	100,00 %	80	240	60%
		Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	230	-	-	-	-	30	30	13.04%
1	20 20 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	150 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	100,00 %	30 laporan	90 laporan	60%
		Peningkatan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	129 OPD	-	-	-	-	43 OPD	43 OPD	33,33%%
		Evaluasi Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	80%	-	30%	30%	100.00 %	50%	30%	60%
		Sosialisasi dan Pengendalian Saber Pungli	100 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	60%
		Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	258 orang	-	245 orang	245 orang	100.00 %	258 orang	258 orang	60%
1	20 20 06	Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	90%	80%	80%	80%	100.00 %	85%	80%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1	20	20	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan TLHP yang diselesaikan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00 %	2 laporan	6 laporan	60%
1	20	20	28	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian TP/TKN	20 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100.00 %	4 rekomendasi	12 rekomendasi	60%
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Konprehensif	Jumlah Laporan Gelar Pengawasan yang diselesaikan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %	1 dokumen	3 dokumen	60%
				Peningkatan Kapabilitas APiP	Dokumen Peningkatan Kapabilitas APiP yang diselesaikan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %	1 dokumen	3 dokumen	60%
				<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Persentase Pengaduan yang Terselesaikan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100.00 %</b>	<b>80%</b>		
				Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan yang diselesaikan	150 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	100.00 %	30 laporan	90 laporan	60%
1	20	21		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya</b>	<b>90%</b>							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan(tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100.00 %	50 Orang	150 Orang	60%
				Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah	Jumlah Peserta Sosialisasi	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100.00 %	100 orang	300 orang	60%

## **A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

### **I. Program Pelayanan Adm Perkantoran**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah pengiriman dokumen dan surat 1.763 lembar, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 1.763 lembar (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 %, keluaran dari kegiatan ini adalah lancarnya pengiriman berupa surat-surat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke obrik terkait dan tercukupinya materai untuk kebutuhan BAP/Surat Pernyataan pada kasus/khusus dengan capaian kinerja berupa terkirimnya surat-surat dan dokumen administrasi perkantoran.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah terbiayainya jasa telepon, air, listrik, dan internet 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 12 bulan (100,00%%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan perkantoran dengan dibayarkannya biaya operasional, listrik, air, telepon dan internet. Dengan capaian kinerja berupa terbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah honorarium, jasa pegawai harian lepas, dan lembur yang dibayarkan 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 12 bulan (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah dibayarkannya honor bulanan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),

pembantu PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara dengan capaian kinerja berupa terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah alat kebersihan yang dibeli dan honor petugas kebersihan 25 jenis dan 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 25 jenis dan 12 bulan (100%%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan lingkungan kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan capaian kinerja berupa terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih.
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah ATK yang disediakan 44 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 44 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk pembuatan LHP, laporan bulanan, triwulanan dan surat-surat lainnya di Inspektorat Dengan capaian kinerja berupa lancarnya administrasi perkantoran.
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran penggandaan 12 jenis dan 79.000 lembar, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 12 jenis dan 79.000 lembar (100%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan, map, amplop Inspektur, amplop Sekretaris Daerah, amplop Bupati serta terlengkapinya bahan yang perlu diperbanyak Dengan capaian kinerja berupa lancarnya administrasi perkantoran.
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah alat listrik yang disediakan 6 jenis, sementara

Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 6 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tergantungnya alat-alat listrik seperti kabel, cok dan bola lampu listrik Dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan untuk operasional inspektorat.

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah porsi makan dan tamu yang disediakan 6.000 porsi, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 6.000 porsi (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya makan dan minum acara rapat dan tamu.
9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah OH yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 21 OH, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 21 OH (100%%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan mengantarkan LHP, Surat-surat, koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat, BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Kementrian Dalam Negeri dan BPK-RI Jakarta dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi inspektorat dengan instansi terkait.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 2 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah peralatan kantor yang diadakan 148 unit, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
3. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah paket mebeleur yang diadakan 3 jenis mobiler, , namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah pemeliharaan 1 paket , namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 43 unit kendaraan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 5 buah kendaraan dinas roda 4 dan 38 buah kendaraan dinas roda 2 dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah sarana peralatan gedung kantor yang terpelihara 6 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 6 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung dan kantor berupa mesin tik, komputer, laptop, AC, printer dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan kantor.



7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah mebeleur kantor yang terpelihara 5 jenis mebeleur, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

### **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah APIP yang mengikuti diklat 54 orang, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 8 orang (14,81%) dan realisasi fisik 100,00 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pejabat, Auditor di Inspektorat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya wawasan aparatur inspektorat, kegiatan ini tidak dapat direalisasikan sesuai target APIP yang mengikuti diklat akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

### **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah Dokumen Laporan sebanyak 10 laporan, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

### **V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

1. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*) adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan dan Pengaduan Atas Pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID-19 Yang Terbit sebanyak 25 laporan,

sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 24 laporan (96,00%) dan realisasi fisik 100,00% , keluaran dari kegiatan ini adalah adalah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan capaian kinerja berupa terbinanya obrik sesuai dengan PKPT.

2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah persentase penyelesaian rekomendasi temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten sebesar 80%, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 80% (100,00 %) dan realisasi fisik 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan Laporan TLHP terhadap 24 obrik dan TLHP BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan capaian kinerja berupa ditindak lanjutnya hasil temuan pengawasan.
3. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah laporan gelar pengawasan 1 dokumen, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 1 dokumen (100,00%) dan realisasi fisik 100,00% keluaran dari kegiatan ini adalah Pemuthakiran TLHP tahun pemeriksaan 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta terikuti RAKORWAS Provinsi dan Nasional dan Bimbingan Teknis Pengawasan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
4. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah laporan evaluasi TLHP 2 laporan, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 2 laporan (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah 2 buah buku Evaluasi Semester I dan Semester II Tahun 2018 dengan capaian kinerja berupa terdapatnya buku data evaluasi TLHP.

5. Kegiatan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah rekomendasi penyelesaian TP/TKN 4 rekomendasi, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
6. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah OPD Peserta Bimtek Dan Sosialisasi 43 OPD, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
7. Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebanyak 50%, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
8. Kegiatan Sosialisasi Dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah Peserta Sosialisasi dan Rapat Tim sebanyak 100 orang, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 100 orang (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya nilai dan level maturitas SPIP.
9. Kegiatan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Yang Melaporkan Harta Kekayaan sebanyak 740 orang ASN dan Pejabat Negara, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 740 orang ASN dan Pejabat Negara (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaporkannya harta kekayaan ASN dan Pejabat Negara di kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Dokumen Peningkatan

Kapabilitas Apip Yang Diselesaikan sebanyak 1 dokumen, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

11. Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dan Pendampingan Terkait Percepatan Penanganan COVID-19 sebanyak 100 laporan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 100 laporan (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaporkannya Hasil Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dan Pendampingan Terkait Percepatan Penanganan COVID-19.

#### **VI. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**

1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan, ujian fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi 55 orang, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah peserta sosialisasi 100 orang, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

#### **VII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

1. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Tersedianya Data TLHP dan Terlaksananya Pemutakhiran Data 1

aplikasi, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

## VIII. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Indikator kinerja program (outcomes) / kegiatan (output) adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan 40 laporan, namun kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat dari *refocussing* dana untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat  
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	-	-	60	60	60	60	65	60	60	65	60	65	-
2	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)			80	80	85	90	95	85	90	90	90	90	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Level Kapabilitas APIP (Level)			2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Jumlah penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)			85	85	90	90	95	90	90	95	90	95	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat			60	65	65	70	75	65	70	75	70	75	
7	Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat			-	-	65	70	75	65	70	75	70	75	

Tabel 2.3  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektur  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	60	60	60	60	60	60	60	65	-
2	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	80	80	85	90	80	85	90	90	
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	2	3	3	3	3	3	3	3	

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Keuangan dan reformasi birokrasi di Inspektorat	Jumlah penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)	85	85	90	90	85	90	90	95	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	60	65	65	70	65	65	70	75	
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	-	-	65	70	65	65	70	75	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;

4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
8. Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai OPD Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.



3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat disajikan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	(3.00.) URUSAN PENUNJANG					(3.00.) URUSAN PENUNJANG					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan	95%	639.069.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan	95%	494.410.500	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Pengiriman Dokumen Dan Surat (Lembar)	1.763 lembar	12.366.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Pengiriman Dokumen Dan Surat (Lembar)	1.763 lembar	12.336.000	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Bulan Dibayarkannya Jasa Telepon, Air, Listrik, Dan Internet (Bulan)	12 Bulan	54.886.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Bulan Dibayarkannya Jasa Telepon, Air, Listrik, Dan Internet (Bulan)	12 Bulan	54.886.000	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat	Jumlah Bulan Honorarium, Jasa Pegawai Harian Lepas, Dan Lembur Yang Dibayarkan (Bulan)	12 Bulan	222.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat	Jumlah Bulan Honorarium, Jasa Pegawai Harian Lepas, Dan Lembur Yang Dibayarkan (Bulan)	12 Bulan	179.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat	Jumlah Alat Kebersihan Yang Dibeli Dan Jumlah Bulan Honor Petugas Kebersihan (Jenis Dan Bulan)	25 Jenis dan 12 Bulan	25.716.500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat	Jumlah Alat Kebersihan Yang Dibeli Dan Jumlah Bulan Honor Petugas Kebersihan (Jenis Dan Bulan)	25 Jenis dan 12 Bulan	24.198.500	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	Jumlah Jenis ATK Yang Disediakan (Jenis)	44 Jenis	61.266.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	Jumlah Jenis ATK Yang Disediakan (Jenis)	44 Jenis	61.266.500	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Jumlah Lembaran Penggandaan	12 Jenis dan 79.000 lembar	41.695.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Jumlah Lembaran Penggandaan	12 Jenis dan 79.000 lembar	30.614.500	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Dan Jenis Alat Listrik Yang Diadakan (Jenis)	6 jenis	5.490.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Dan Jenis Alat Listrik Yang Diadakan (Jenis)	6 jenis	3.780.000	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perda Yang Diadakan	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perda Yang Diadakan	12 bulan	3.000.000	
1.9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Inspektorat	Jumlah Porsi Makan Minum Rapat Dan Tamu Yang Disediakan (Porsi)	6.000 porsi	82.500.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Inspektorat	Jumlah Porsi Makan Minum Rapat Dan Tamu Yang Disediakan (Porsi)	6.000 porsi	34.025.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah OH Yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi (OH)	21 OH	130.149.000	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah OH Yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi (OH)	21 OH	91.074.000	
2.	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Kelengkapan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1.972.668.674</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Kelengkapan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>93.023.904</b>	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	-	420.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	-	-	
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	-	1.186.650.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	-	-	
2.3	Pengadaan Mebeleur	Inspektorat	Jumlah Paket Mebeleur Yang Diadakan	-	205.114.600	Pengadaan Mebeleur	Inspektorat	Jumlah Paket Mebeleur Yang Diadakan	-	-	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	-	38.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	-	-	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Unit)	43 Unit Kendaraan	106.954.074	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Unit)	43 Unit Kendaraan	89.473.904	

Lembar 4 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	10.300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	3.550.000	
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Inspektorat	Jumlah Mebeleur Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	5.650.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Inspektorat	Jumlah Mebeleur Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-	
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase APIP yang telah Terlatih</b>	<b>92%</b>	<b>698.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase APIP yang telah Terlatih</b>	<b>92%</b>	<b>151.809.400</b>	
3.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Inspektorat	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	8 orang	698.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Inspektorat	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	8 orang	151.809.400	
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Inspektorat</b>	<b>70</b>	<b>2.985.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Inspektorat</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Laporan	-	2.985.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Laporan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	<b>(3.00.01.) INSPEKTORAT</b>					<b>(3.00.01.) INSPEKTORAT</b>					
1.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>Persentase Pengaduan Terselesaikan</b>	80%	<b>2.216.071.730</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>Persentase Pengaduan Terselesaikan</b>	80%	<b>1.685.327.000</b>	
1.1	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan dan Pengaduan Atas Pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID-19 Yang Terbit	25 Laporan	176.053.200	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan dan Pengaduan Atas Pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID-19 Yang Terbit	25 Laporan	222.671.000	
1.2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan Inspektorat	80 %	75.863.800	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan Inspektorat	80 %	34.532.000	
1.3	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Inspektorat	Jumlah Laporan Gelar Pengawasan Yang Diselesaikan	1 Dokumen	109.102.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Inspektorat	Jumlah Laporan Gelar Pengawasan Yang Diselesaikan	1 Dokumen	18.255.000	
1.4	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Laporan TLHP Yang Diselesaikan	2 Laporan	750.000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Laporan TLHP Yang Diselesaikan	2 Laporan	750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian TP/TKN	-	13.672.000	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian TP/TKN	-	-	
1.6	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	Jumlah OPD Peserta Bimtek Dan Sosialisasi	-	549.695.730	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	Jumlah OPD Peserta Bimtek Dan Sosialisasi	-	-	
1.7	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	50%	48.344.000	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	50%	48.344.000	
1.8	Sosialisasi Dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	Inspektorat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Rapat Tim	100 Orang	140.555.000	Sosialisasi Dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	Inspektorat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Rapat Tim	100 Orang	111.175.000	
1.9	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Inspektorat	Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Yang Melaporkan Harta Kekayaan	245 Orang	44.842.000	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Inspektorat	Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Yang Melaporkan Harta Kekayaan	245 Orang	7.660.000	
1.10	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Dokumen Peningkatan Kapabilitas Apip Yang Diselesaikan	-	44.194.000	Peningkatan Kapabilitas Apip	Inspektorat	Dokumen Peningkatan Kapabilitas Apip Yang Diselesaikan	-	-	
1.11	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dan Pendampingan Terkait Percepatan Penanganan COVID-19	100 Laporan	1.013.000.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dan Pendampingan Terkait Percepatan Penanganan COVID-19	100 Laporan	1.241.940.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan</b>		<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level 3</b>	<b>690.902.000</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan</b>		<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level 3</b>	-	
2.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat	Jumlah APIP Yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	50 Orang	664.335.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat	Jumlah APIP Yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	50 Orang	-	
2.2	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah	Inspektorat	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	26.567.000	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah	Inspektorat	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	-	
III.	(4.00.01.) SEKRETARIAT					(4.00.01.) SEKRETARIAT					
1.	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>		<b>Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi yang digunakan</b>	<b>1 Aplikasi</b>	<b>19.809.000</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>		<b>Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi yang digunakan</b>	<b>1 Aplikasi</b>	-	
1.1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Inspektorat	Tersedianya Data TLHP dan Terlaksananya Pemutakhiran Data	1 Aplikasi	19.809.000	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Inspektorat	Tersedianya Data TLHP dan Terlaksananya Pemutakhiran Data	1 Aplikasi	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>Persentase Pengaduan yang diselesaikan</b>	<b>80%</b>	<b>6.042.000</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>Persentase Pengaduan yang diselesaikan</b>	<b>80%</b>	-	
2.1	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Jumlah Laporan yang dihasilkan	-	6.042.000	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Jumlah Laporan yang dihasilkan	-	-	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat, dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota**

##### **3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, isu – isu penting pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai antara lain pencapaian target ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola dan politik hukum dan kemanan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2021– 2026 tersebut meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan perkapita
3. Pemerataan pembangunan
4. Pengentasan kemiskinan
5. Kelanjutan pembangunan
6. Peningkatan daya saing
7. Inovasi teknologi
8. SDM berkualitas
9. Resiliensi berbasis sawkarsa

##### **3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

### **3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan

nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilah produktif.

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Bagi Inspektorat kiranya **“Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, Beretika dan Bertanggungjawab serta Pembangunan Daerah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”** merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korupsi, kolusif dan nepotisme. Pemerintahan yang baik dan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, yaitu mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

#### **3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota), maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Inspektorat untuk bisa mewujudkan visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu: **”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang

dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, adalah untuk mendukung misi ke-4 Kepala Daerah terpilih yaitu:

**”Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”**

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

**TUJUAN:**

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten yaitu:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	80	80	82	83	84	85
		2 Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3,03	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6
		3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	82	82,75	83,25	83,75	84,25	85,5
2	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	4	4
3	Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Inspektorat	5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat	80	82	84	86	88	90
			Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	60	63	65	67	70	70

### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi dan kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :



- 1 - Strategi : Melakukan Pengawasan Internal berupa Pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
  - Kebijakan : Pengawasan Kinerja, Keuangan, Reviu, Pengawasan Desa dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 - Strategi : Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
  - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
  - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
  - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat
  - Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
  - Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

Berdasarkan uraian tersebut Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2021-2026

<b>Visi : “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</b>				
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya</b>				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Melakukan Pengawasan Internal berupa Pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengawasan Kinerja, Keuangan, Reviu, Pengawasan Desa dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
		2 Meningkatkan maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada OPD.	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
		3 Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan; 2. Menerapkan sangsi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 2.Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
2	Meningkatnya peran APiP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Meningkatkan Kapabilitas APiP	1.Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2.Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3.Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat 4.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3. Pelaksanaan evaluasi 4. Mengikuti Ujian Sertifikasi APiP

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Inspektorat	5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja, Keuangan dan reformasi birokrasi di Inspektorat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan EValuasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Urusan Pemerintahan Umum.

Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3

Program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> <li>7. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul>
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> </ul>

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>7. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pengadaan Mebel</li> <li>3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>JML</b>	<b>1 Program</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>34 Sub Kegiatan</b>

Tabel 3.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
		2. Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan Integritas
<b>JML</b>	<b>2 Program</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>15 Kegiatan</b>

Berdasarkan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program dengan 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.00 INSPEKTORAT  
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						15.214.176.549	15.279.221.000					
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						12.082.381.349	11.209.600.000					
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.183.700	215.000.000					
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun	3 Dokumen			31.751.000	50.000.000	
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen			10.290.100	30.000.000	
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen			9.638.700	25.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen			10.945.200	30.000.000	
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen			10.492.500	25.000.000	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, penetapan kinerja Inspektorat)	5 Dokumen			10.691.200	30.000.000	
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi	4 laporan			31.375.000	25.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>6.414.546.149</b>	<b>6.355.600.000</b>					
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	60 Orang			6.366.585.649	6.120.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen SPj yang Diverifikasi	1000 Dokumen			8.250.000	55.000.000	
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen			5.265.000	45.000.000	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Inspektorat yang disusun	1 Dokumen			6.426.400	40.000.000	
6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen			18.226.000	30.000.000	
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disiapkan	18 Laporan			5.892.900	30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan			3.900.000	35.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2.118.346.000</b>	<b>2.209.000.000</b>					
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 Stel			74.750.000	89.250.000	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	60 orang			1.190.000.000	1.139.736.700	
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang			272.675.000	367.500.000	
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah APIP yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pemantapan	60 Orang			580.921.000	612.513.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>676.360.500</b>	<b>1.090.000.000</b>					
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket			10.789.000	75.000.000	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket			234.450.000	125.000.000	
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	25 Jenis			27.439.500	65.000.000	
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket			70.693.000	80.000.000	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis			43.775.000	65.000.000	
											Jumlah Penggandaan yang disediakan	84.010 Lembar					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 eksemplar			2.000.000	35.000.000	
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tamu yang dilayani	200 orang			77.900.000	125.000.000	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 laporan			209.314.000	520.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>2.111.930.000</b>	<b>660.000.000</b>					
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang diadakan	10 Unit			888.700.000	300.000.000	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	6 Jenis			135.730.000	180.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Aula Inspektorat	1 Unit			1.087.500.000	180.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>248.995.000</b>	<b>270.000.000</b>					
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengiriman Surat dan Dokumen	900 Lembar			6.680.000	10.000.000	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (zoom meeting)	12 paket			63.750.000	80.000.000	
											Jumlah rekening tagihan telepon/ fax yang dibayarkan	12 rekening					
											Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	1.500 meter kubik					
											Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	3.600 KWH					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	6 orang			178.565.000	180.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>397.020.000</b>	<b>410.000.000</b>					
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	45 Unit			300.570.000	275.000.000	
											Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 unit					
											Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 unit					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit			74.400.000	80.000.000	
6 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 kegiatan			22.050.000	55.000.000	
<b>6 1 2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>										<b>2.315.446.000</b>	<b>3.149.621.000</b>	
<b>6 1 2 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>										<b>1.829.716.000</b>	<b>2.569.621.000</b>	
6 1 2 2.01 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			LHP Kinerja dan LHE yang diterbitkan	90 laporan			316.100.000	500.000.000	
6 1 2 2.01 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			LHP yang diterbitkan	12 Laporan			340.770.000	500.000.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	25 Laporan			415.790.000	534.621.000	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	1 Laporan			26.880.000	35.000.000	
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Desa yang Diterbitkan	45 Laporan			214.825.000	400.000.000	
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			94.482.000	150.000.000	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Dilaksanakan	80%  80%			418.869.000	450.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>						<b>485.730.000</b>	<b>580.000.000</b>					
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Dilaksanakan	1 Laporan			176.080.000	180.000.000	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	15 Laporan			309.650.000	400.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						<b>816.349.200</b>	<b>920.000.000</b>					
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>						<b>220.809.600</b>	<b>250.000.000</b>					
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			124.686.000	130.000.000	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			96.123.600	120.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>595.539.600</b>	<b>670.000.000</b>					
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			101.427.000	125.000.000	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan			168.042.600	230.000.000	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			166.192.000	135.000.000	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			159.878.000	180.000.000	
<b>TOTAL</b>											<b>15.214.176.549</b>	<b>15.279.221.000</b>					

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.00 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
6	1				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						15.214.176.549	15.279.221.000			
6	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>						12.082.381.349	11.209.600.000			
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.183.700	215.000.000			
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun	3 Dokumen		31.751.000	50.000.000	
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen		10.290.100	30.000.000	
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen		9.638.700	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen			10.945.200	30.000.000	
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen			10.492.500	25.000.000	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, penetapan kinerja Inspektorat)	5 Dokumen			10.691.200	30.000.000	
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi	4 laporan			31.375.000	25.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>6.414.546.149</b>	<b>6.355.600.000</b>					
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	60 Orang			6.366.585.649	6.120.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen SPj yang Diverifikasi	1000 Dokumen			8.250.000	55.000.000	
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen			5.265.000	45.000.000	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Inspektorat yang disusun	1 Dokumen			6.426.400	40.000.000	
6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen			18.226.000	30.000.000	
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disiapkan	18 Laporan			5.892.900	30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan			3.900.000	35.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2.118.346.000</b>	<b>2.209.000.000</b>					
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 Stel			74.750.000	89.250.000	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	60 orang			1.190.000.000	1.139.736.700	
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang			272.675.000	367.500.000	
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah APIP yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pemantapan	60 Orang			580.921.000	612.513.300	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>676.360.500</b>	<b>1.090.000.000</b>					
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket			10.789.000	75.000.000	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket			234.450.000	125.000.000	
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	25 Jenis			27.439.500	65.000.000	
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket			70.693.000	80.000.000	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis			43.775.000	65.000.000	
											Jumlah Penggandaan yang disediakan	84.010 Lembar					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 eksemplar			2.000.000	35.000.000	
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tamu yang dilayani	200 orang			77.900.000	125.000.000	
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 laporan			209.314.000	520.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>2.111.930.000</b>	<b>660.000.000</b>					
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang diadakan	10 Unit			888.700.000	300.000.000	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	6 Jenis			135.730.000	180.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Aula Inspektorat	1 Unit			1.087.500.000	180.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>248.995.000</b>	<b>270.000.000</b>					
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengiriman Surat dan Dokumen	900 Lembar			6.680.000	10.000.000	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (zoom meeting)	12 paket			63.750.000	80.000.000	
											Jumlah rekening tagihan telepon/ fax yang dibayarkan	12 rekening					
											Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	1.500 meter kubik					
											Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	3.600 KWH					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	6 orang			178.565.000	180.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>397.020.000</b>	<b>410.000.000</b>					
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	45 Unit			300.570.000	275.000.000	
											Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 unit					
											Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 unit					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit			74.400.000	80.000.000	
6 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 kegiatan			22.050.000	55.000.000	
<b>6 1 2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>										<b>2.315.446.000</b>	<b>3.149.621.000</b>	
<b>6 1 2 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>										<b>1.829.716.000</b>	<b>2.569.621.000</b>	
6 1 2 2.01 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			LHP Kinerja dan LHE yang diterbitkan	90 laporan			316.100.000	500.000.000	
6 1 2 2.01 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			LHP yang diterbitkan	12 Laporan			340.770.000	500.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	25 Laporan			415.790.000	534.621.000	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	1 Laporan			26.880.000	35.000.000	
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Desa yang Diterbitkan	45 Laporan			214.825.000	400.000.000	
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			94.482.000	150.000.000	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Dilaksanakan	80%  80%			418.869.000	450.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>						<b>485.730.000</b>	<b>580.000.000</b>					
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Dilaksanakan	1 Laporan			176.080.000	180.000.000	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	15 Laporan			309.650.000	400.000.000	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						<b>816.349.200</b>	<b>920.000.000</b>					
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>						<b>220.809.600</b>	<b>250.000.000</b>					
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			124.686.000	130.000.000	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			96.123.600	120.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif  (Rp.)	Prakiraan Maju  (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>595.539.600</b>	<b>670.000.000</b>					
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			101.427.000	125.000.000	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan			168.042.600	230.000.000	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			166.192.000	135.000.000	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			159.878.000	180.000.000	
<b>TOTAL</b>											<b>15.214.176.549</b>	<b>15.279.221.000</b>					



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/ audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**SUHERMAN, SE**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 19681225 199703 1 005